

BAB IV

PROFIL DAN OBJEK PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. Visi, Misi dan Tata Nilai DPMPTSP

Visi DPMPTSP Prov. DKI Jakarta adalah “Solusi Investasi dan Perizinan di Jakarta”. Penjabaran lebih lanjut tentang Visi Misi DPMPTSP adalah sebagai berikut:

1. Menjadi solusi bagi investor untuk berinvestasi di Jakarta dengan menciptakan iklim investasi dan berbisnis yang mudah, cepat, nyaman, transparan dan tidak berbelit – belit;
2. Menjadi solusi dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan dengan kualitas pelayanan publik yang prima (service excellent); dan
3. Menjadi solusi terhadap permasalahan perizinan dan nonperizinan dengan kualitas pelayanan publik yang mengedepankan nilai – nilai SETIA (Solusi, Empati, Tegas, Inovasi, Andal).

Dengan penjabaran visi tersebut, maka misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah:

1. Meningkatkan nilai investasi melalui promosi, penyempurnaan peraturan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi

2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui penciptaan inovasi layanan berbasis sistem teknologi informasi
3. Mengelola pengaduan masyarakat dengan berbasis quick response
4. Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai kompetensi
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan handal

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi DPMPTSP Prov. DKI Jakarta

Dalam Pergub No. 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja DPMPTSP, kedudukan, tugas dan fungsi DPMPTSP Prov. DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda
2. Dalam melaksanakan tugas, Dinas dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda
3. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Dinas
4. Dinas dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Wakil Kepala Dinas
5. Wakil Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

6. Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin penyelenggaraan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
7. Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Dinas
8. Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
9. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas
 - b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
 - c. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur dinas
 - d. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur dinas
 - e. Penyelenggaraan penanaman modal
 - f. Penyelenggaraan pelayanan perizinan/non perizinan
 - g. Penandatanganan dan penyerahan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangan
 - h. Penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangan
 - i. Pengelolaan arsip dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangan
 - j. Pengelolaan data dan sistem teknologi informasi dinas

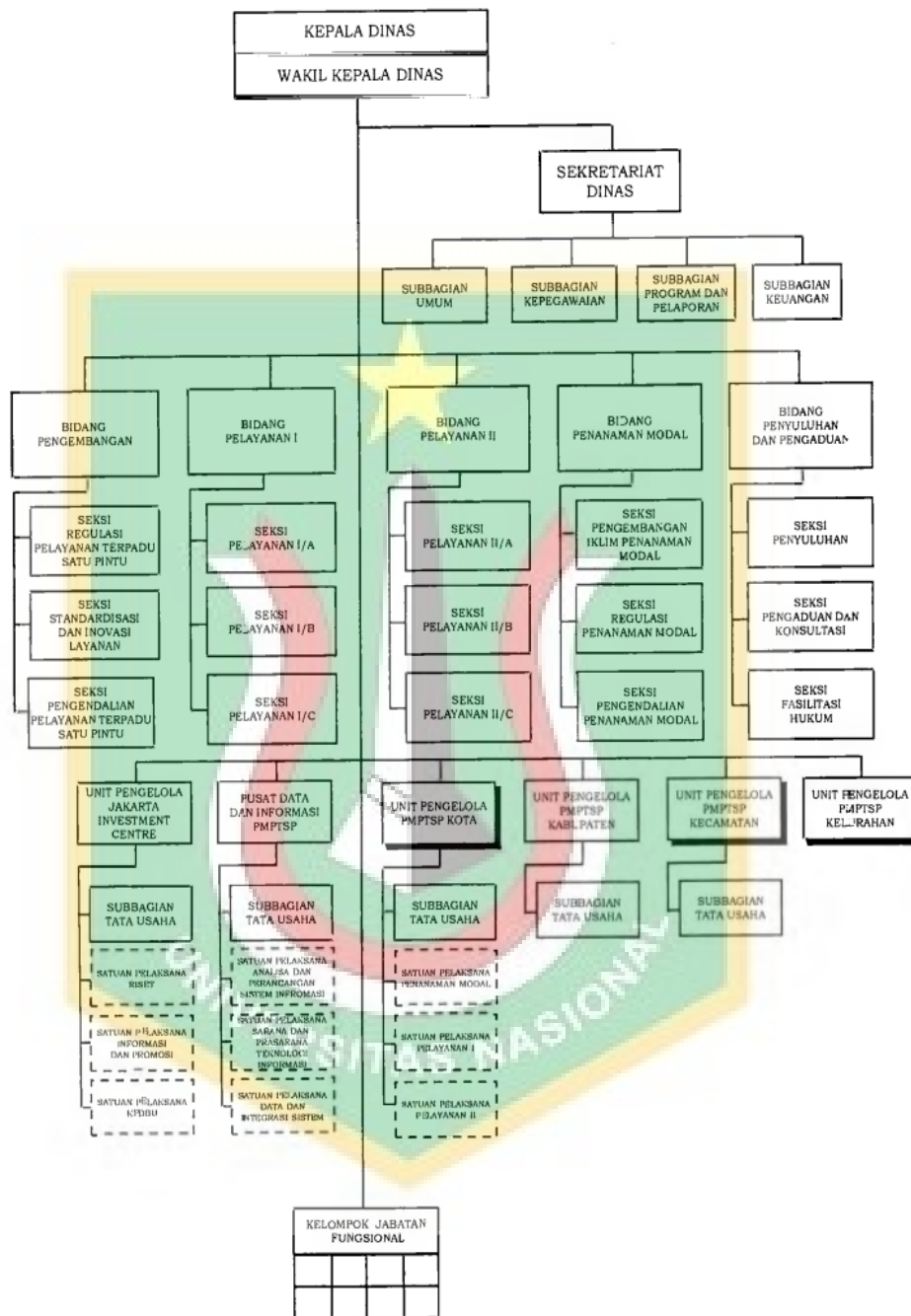
- k. Pelayanan penyuluhan, penyelesaian pengaduan/keluhan, masyarakat serta fasilitasi hukum atas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- l. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas
- m. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
- n. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah

C. Struktur Organisasi DPMPTSP

Kewenangan proses perizinan dibagi secara bertingkat terdiri dari DPMPTSP di level Provinsi, UP Pelayanan PTSP Kota di level Kota Administrasi, UP PTSP Kecamatan di level Kecamatan, serta UP PTSP Kelurahan di level Kelurahan. Secara lebih rinci, susunan organisasi DPMPTSP dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4 1 Struktur Organisasi DPMPTSP Prov. DKI Jakarta



Sumber: Pergub No. 160 2019

D. Sumber Daya DPMPTSP Prov. DKI Jakarta

1. Sumber Daya Manusia

Khusus untuk Dinas di level pemerintahan Provinsi, terhitung pada tahun 2020 berjumlah 157 PNS. Jumlah PNS tersebut masih jauh dari kata cukup untuk jumlah pegawai dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan. Oleh karena itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan pegawai antara lain dengan penyediaan pegawai kontrak perorangan meliputi Arsitek, Surveyor Berlisensi, Inspektur SLF, Penunjang Juru Ukur, PHL, Caraka, Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) dan Customer Relation Officer, dengan rincian sebagai berikut:

- Arsitek 16 orang
- Inspektur SLF, Juru Ukur, Penunjang Juru Ukur, Pengolah Data 363 orang
- PHL 380 orang
- Caraka 55 orang
- Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) 200 orang
- Customer Relation Officer (CRO) 300 orang
- Call Center sebanyak 30 orang
- Mekanikal/Elektrikal, Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan 76 orang

Secara keseluruhan jumlah pegawai baik PNS maupun PJLP pada DPMPTSP Prov. DKI Jakarta berjumlah 2.692 orang.

E. Profil Mal Pelayanan Publik (MPP) Prov. DKI Jakarta

Mal Pelayanan Publik (MPP) berada di tengah kota Jakarta, tepatnya berada di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C – 22, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Secara Geografis letaknya berbatasan dengan Kelurahan Karet di sebelah Utara, Jl. Prof. Dr. Satrio (Kelurahan Karet Semanggi) di sebelah barat, Kali Cideng (Kelurahan Kuningan Timur) di sebelah timur dan Kelurahan Karet di sebelah selatan, dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 4 1 Letak Geografis MPP DPMPTSP DKI Jakarta

Sebelah Utara	Kelurahan Karet
Sebelah Barat	Jl. Prof. Dr. Satrio (Kelurahan Karet Semanggi)
Sebelah Timur	Kali Cideng (Kelurahan Kuningan Timur)
Sebelah Selatan	Kelurahan Karet

Sumber: Wikipedia (diakses pada Selasa, 03 Januari 2023, pukul 18:00)

MPP didirikan berdasarkan pada Peraturan Menteri PAN RB No. 23 Tahun 2017. Tujuan MPP adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat DKI dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah ini dilakukan dengan mengintegrasikan pelayanan publik secara aman, nyaman dan hemat waktu. Sehingga masyarakat dapat mengurus pelayanan secara cepat, hemat waktu di satu tempat.

Gambar 4 2 Tampak Depan MPP DPMPTSP Prov. DKI Jakarta



Sumber: Dokumentasi Penelitian



F. Pelayanan di DPMPTSP Prov. DKI Jakarta

Jenis – jenis layanan yang ada di MPP:

Tabel 4 2 Jenis Pelayanan Mal Pelayanan Publik Jakarta

No.	Jenis	Pelayanan	Keterangan
1	DPMPTSP	Perizinan dan non Perizinan	Perizinan
		Konsultasi	Non Perizinan
		JIC	Perizinan NonPerizinan
		Gerai memulai usaha	Perizinan NonPerizinan
		Layanan Prioritas	Untuk disabilitas
		Layanan Fast Track	Pengguna AJIB
2	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP	Pelayanan
		Konfirmasi Status Wajib Pajak	Pelayanan
		Pembukaan Kode Billing	Pelayanan
		Asistensi Layanan Mandiri	Pelayanan
		Konsultasi Umum Perpajakan	Pelayanan
3	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Layanan No Identitas Kepabeanan	Pelayanan
		Tracking Barang Kiriman	Pelayanan
		Konsultasi	Pelayanan
4	Direktora Jenderal Imigrasi	Perpanjangan Paspor	Pelayanan
		Izin Tinggal Terbatas (ITAS)	Pelayanan
5	Direktora Jenderal Administasi, Hukum, Umum (AHU)	Pengesahan PT	Perizinan
		Pengesahan Yayasan	Perizinan
		Pengesahan Perkumpulan	Perizinan
		Permohonan Company Profile, PT	Pelayanan
		Yayasan dan Perkumpulan	Pelayanan
		Pendaftaran Notaris	Perizinan
		Pendaftaran Fidusia	Perizinan
		Pendaftaran Wasiat	Pelayanan
		Pendaftaran PPNS	Pelayanan
		Permohonan Pewarganegaraan	Perizinan
		Permohonan Kewarganegaraan	Perizinan
		Permohonan Mutual Legal Assistance	Perizinan

6	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Konsultasi Perizinan Penanaman Modal	Pelayanan
7	BMKG		Pelayanan
8	Kanwil Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta	Pengecekan Sertifikat	Pelayanan
		Surat Keterangan Pendaftaran Tanah SKPT	Perizinan
		Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT)	Pelayanan
9	Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya	SIM Perpanjangan	Pelayanan
		STNK Pengesahan	Pelayanan
		SKCK	Pelayanan
		Surat Keterangan Laporan Kehilangan	Pelayanan
10	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	Pengesahan Pembayaran PKB BBNKB	Pelayanan
		Mutasi Nama dan Alamat STNK	Pelayanan
		Proses Pindah Alamat Keluar Daerah STNK	Pelayanan
		Pajak Hotel	Pelayanan
		Pajak Restoran	Pelayanan
		Pajak Hiburan	Pelayanan
		Pajak Air Tanah	Pelayanan
		Pajak Parkir	Pelayanan
		Pajak Reklame	Pelayanan
		PBB KB	Pelayanan
		Pajak BPHTB	Pelayanan
		Pajak Bumi dan Bangunan	Pelayanan
		UPPRD Setiabudi	Pelayanan
11	Dukcapil	Perekaman KTP Elektronik	Pelayanan
		Pelayanan Akta Kelahiran	Pelayanan
		Kartu Keluarga	Pelayanan
		Informasi Administrasi Kependudukan	Pelayanan

12	Jasa Raharja	Kolektor Tarif Sumbangan Wajib (SW) dan Verifikasi untuk wajib pajak yang membayar pajak kendaraan	Pelayanan
		Kliam Jasa Raharja / Santunan	Pelayanan
13	BPJS Kesehatan	Pendaftaran Peserta Baru	Pelayanan
		Mutasi Data	Pelayanan
		Informasi dan Pengaduan	Pelayanan
14	BPJS Ketenagakerjaan	Pendaftara Peserta baru untuk peserta penerima upah (Formal sektro) dan buka penerima upah (Informal sektor)	Pelayanan
		BPJSTK Checking	Pelayanan
		Informasi dan Pengaduan	Pelayanan
		E - klaim	Pelayanan
		E - saldo	Pelayanan
15	PT. PLN	Pasang Listrik Baru	Pelayanan
		Perubahan Daya	Pelayanan
		Pasang Listrik sementara	Pelayanan
16	Bank DKI	Layanan Perbankan	Pelayanan
17	PT. Jamkrida Jakarta	Penjaminan kredit usaha mikro kecil, menengah dan koperasi	Pelayanan
18	Bazis Prov. DKI Jakarta		Pelayanan

Sumber: Profil DPMPTSP Prov. DKI Jakarta